

Membingkai Pola *Chilean Student Movement* pada Pergerakan Mahasiswa Indonesia dalam Perjuangan Hak Pendidikan

Fiqri Hidayat^{1*}, Raihan Arrahman², Billy Ahmad Musa³

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas

²Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas

³Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas.
Limau Manis, Pauh, Padang, Sumatera Barat 25175

Penulis Korespondensi/E-mail: Fiqrih92@gmail.com

Abstract

The research aims to know and analyze the Chilean student movement in 2011, and to discuss a comparative study on the current pattern of the Indonesian student movement. Based on available material and secondary sources, it is relevant to describe the main symbols of today's student movement—the main part of the student discourse and its relationship with the education system. The student movement is a process of expressing accumulated grievances against some of the neoliberal features in education that are similar to those now occurring in Indonesia facing the education system. The research method used is Historical Comparative by using an Analytical Descriptive approach. The scope of this research is to discuss the current pattern of the Indonesian student movement with a comparative study referring to the Chilean student movement. The Chilean Student Movement in this case is informative and educative not only for those concerned with student participation but also affects the potential disadvantages of market-oriented education policies that are often felt today. The Indonesian student movement is still not progressive and has not had a broad impact on society. Government policies are still far from the ideals of the country, the issues raised in this paper are related to free education, and the schemes and patterns adopted from the Chilean movement can certainly be a boost to the progressive spirit of the student movement in Indonesia in realizing the ideals of the country.

Keywords: *Neoliberal; Education; Student Movement; Patterns.*

Abstrak

Penelitian hendak mengetahui dan menganalisis bagaimana gerakan mahasiswa Chili tahun 2011, dan studi perbandingan pola pergerakan mahasiswa Indonesia saat ini. Berdasarkan materi yang tersedia dan sumber-sumber sekunder, relevan menggambarkan simbol utama gerakan mahasiswa dewasa ini. Bagian utama dari wacana mahasiswa dan hubungannya dengan sistem pendidikan. Gerakan mahasiswa merupakan sebuah proses untuk mengekspresikan akumulasi keluhan terhadap beberapa fitur neoliberal dalam pendidikan yang serupa kini terjadi di Indonesia menghadapi sistem pendidikan. Metode Penelitian yang digunakan adalah Historis Komparatif dengan menggunakan pendekatan Deskriptif Analitis. Ruang lingkup penelitian ini adalah membahas tentang pola pergerakan mahasiswa Indonesia saat ini dengan studi perbandingan mengacu kepada pergerakan mahasiswa Chile. Gerakan Mahasiswa Chile dalam kasus ini informatif dan edukatif tidak hanya bagi mereka yang peduli dengan partisipasi mahasiswa, melainkan mempengaruhi potensi kerugian dari kebijakan-kebijakan pendidikan yang berorientasi pasar yang kerap dirasa dewasa ini. Gerakan mahasiswa Indonesia ternilai masih belum progresif dan belum berdampak luas bagi masyarakat. Kebijakan pemerintah masih jauh dari cita-cita negara, isu yang diangkat dalam tulisan ini berkaitan dengan pendidikan

gratis, skema dan pola yang diadopsi dari gerakan Chile tentunya dapat menjadi pendorong semangat yang progresif pada gerakan mahasiswa di Indonesia dalam wujudkan cita-cita negara.

Kata Kunci: *Neoliberal; Pendidikan; Pergerakan Mahasiswa; Pola.*

PENDAHULUAN

Pada akhir Mei 2006, momen bersejarah tercipta di Chile, dimana setidaknya 790.000 pelajar turun kejalan, melakukan pemogokan dan menduduki sekolah-sekolah untuk menyuarakan aspirasinya terkait pendidikan di Chile (Pamflet Generasi, 2018). Gerakan mahasiswa Chili tahun 2011, sebuah gerakan paling relevan yang muncul di Chili sejak berakhirnya kediktatoran Pinochet pada tahun 1990. Pada tahun 2011 para mahasiswa mengorganisir demonstrasi besar-besaran selama tujuh bulan, mereka mengambil alih universitas mereka, mengadakan pertemuan, dan pada akhirnya mengubah agenda pendidikan publik (Cabalin, 2014).

Aksi ini dikenal dengan *Penguin Revolution*, gerakan mahasiswa dapat didefinisikan sebagai upaya “sejumlah besar mahasiswa untuk membawa atau mencegah perubahan dalam salah satu dari hal-hal berikut: kebijakan, personil kelembagaan, struktur sosial (institusi), atau aspek budaya masyarakat yang melibatkan masyarakat serta melibatkan tindakan kolektif yang dilembagakan atau tidak dilembagakan atau keduanya secara bersamaan”. Perspektif terkait gerakan mahasiswa Chili tahun 2011 dapat dianggap sebagai sebuah kasus paradigmatik (Cabalin, 2014).

Semenjak para pemimpin mahasiswa, serta beberapa anggota generasi penguin menduduki jabatan terpilih bersama presiden Chile yang berusia 36 tahun, Gabriel Boric, dan orang-orang sezamannya yang berasal dari pemogokan universitas tahun 2011, juga merupakan pemimpin protes saat masih kuliah, telah menegaskan kembali dukungannya terhadap proses konstitusi baru, namun hanya memiliki sedikit modal politik untuk meyakinkan setelah kegagalan konstitusi yang diusulkan (Bartlett, 2022).

Kemenangan Michelle Bachelet dari koalisi Nueva Mayoría (koalisi *Concertación* yang diperbesar) dengan janji akan menggratiskan biaya pendidikan tinggi dan setara 70% mahasiswa Chile, atau sama dengan

840.000 orang, dalam waktu empat tahun, merupakan kesejukan untuk reformasi sistem ekonomi-politik di Chile (Polglaze, 2016)

Janji kampanye kemudian akan dijadikan produk kebijakan. Hal ini tidak lah muncul secara tiba-tiba atau mendadak, melainkan berangkat dari gerakan mahasiswa yang sudah berjuang untuk pendidikan tinggi yang lebih baik di Chile sejak 2005 hingga 2014 (Polglaze, 2016).

Dilihat pada pergerakan nasional Indonesia mulanya dilakukan sebagai melawan bangsa yang menjajah guna melahirkan sebuah Negara yang merdeka. Kemudian, seiring berjalannya waktu mendorong terbentuknya organisasi-organisasi yang memiliki tujuan untuk memerdekakan bangsa Indonesia. Salah satu organisasi pertama yang terkenal dalam sejarah pergerakan nasional adalah Budi Utomo yang bergerak dalam bidang sosial sebagai akibat dari tindakan kolonialisme Belanda di Indonesia, serta memberikan pendidikan sebagai sarana kemajuan suatu bangsa.

Mahasiswa di seluruh dunia seringkali menjadi kalangan masyarakat sipil yang melakukan partisipasi politik, selain buruh. Mereka biasanya adalah kelompok terpelajar yang melek politik, berserikat, berdiskusi atau berkonsolidasi, dan membuat kajian untuk merespon situasi dan kondisi yang terjadi. Sejak Indonesia merdeka, mahasiswa memiliki sejarah panjang pergerakannya. Keberadaan di masa demokrasi Terpimpin, sektor pendidikan di Indonesia berkembang dan memunculkan berbagai macam golongan mahasiswa, bertujuan untuk menguatkan afiliasinya dengan partai dan basis massa. Afiliasi ini sudah terbentuk sejak kemerdekaan. Diantaranya yaitu Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) berafiliasi dengan Masyumi, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dengan PNI, Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia (CGMI) dengan PKI, dan Gerakan Mahasiswa Sosialis (Gemsos) dengan PSI.

Gerakan mahasiswa Indonesia pada masa itu berhasil goreskan warna sebagai salah satu hal

penentu fondasi demokrasi di Indonesia. Namun, kini gerakan mahasiswa kurang terlihat perannya dalam mengawal demokrasi sebagai oposisi untuk kebijakan pemerintah yang kurang berpihak kepada rakyat (Kontras, 2010).

Pada hal jika disoroti kembali pada gerakan mahasiswa pada tahun 1998 adalah sebuah perubahan sosial dalam bentuk gerakan reformasi dimana perubahan sosial yang terjadi adalah upaya untuk memajukan masyarakat tanpa mengubah struktur dasar yang telah ada (Jubaedah, 2019).

Sejarah Indonesia mencatat, gerakan mahasiswa terlihat pada momentum tertentu menemui titik keemasan dan menjadi motor perubahan, tapi tidak sedikit gerakan mahasiswa mengalami disorientasi yang berujung pada keterpurukan (Polglaze, 2016).

Banyak faktor yang mempengaruhi konteks tersebut, diantaranya:

1. Pergerakan mahasiswa harus segera menemukan jati dirinya kembali sebagai agen perubahan (*agent of change*) dan gerakan moral (*moral movement*).
2. Harus mampu berkontekstualisasi dengan isu-isu kerakyatan, sehingga tidak lagi berjarak dengan gerakan masyarakat sipil lainnya.
3. Mampu membangun konsistensi sehingga tidak lagi muncul gerakan parsial dan sporadis.

Sehubungan hal tersebut apabila dikorelasikan dengan dunia pendidikan Indonesia sangat dinamis dan kaya dengan berbagai wacana bahkan program, tapi tidak ada satu pun yang terealisasi dengan optimal, salah satu wacana yang acapkali didengungkan adalah penerapan pendidikan gratis. Pendidikan gratis merupakan pendidikan yang membebaskan para peserta didik ataupun orang tua peserta didik, terutama biaya yang berkaitan dengan proses belajar mengajar dan kegiatan pembangunan sekolah (Wahid, 2023).

Wacana yang sangat anomali yang menggambarkan anak-anak usia sekolah tidak bisa sekolah, diperlakukan tidak adil di sekolah/kampus, putus sekolah, tidak menerima ijazah, karena orangtua/wali tidak mampu membayar biaya pendidikan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah/kampus. Hal

tersebut tampak ironis karena konstitusi atau UUD 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan menjadi tanggung jawab negara (Wahid, 2023).

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menetapkan, pemerintah pusat dan daerah menjamin terselenggaranya program wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. Seperti alokasi anggaran berdasarkan Peraturan Pemerintah 18/2022, pasal 80 dan 81 menyatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah membiayai pendidikan dengan alokasi anggaran 20% dari APBN dan APBD. Meskipun konstitusi dan UU mengamanatkan penerapan pendidikan gratis, minimal untuk pendidikan dasar, tidak semua kalangan masyarakat, termasuk para penyelenggara dan pengelola pendidikan memiliki suara bulat atas hal tersebut (Wahid, 2023).

Manfaat utama dari kebijakan pendidikan gratis adalah membuka akses terhadap pendidikan. Pendidikan gratis memungkinkan masyarakat dari semua latar belakang, termasuk mereka yang berasal dari ekonomi menengah kebawah, memiliki akses pendidikan bermutu, serta berpotensi mampu menurunkan angka kemiskinan, sebab pendidikan gratis lebih banyak memperoleh keterampilan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk mendapatkan pekerjaan dan gaji lebih layak (Wahid, 2023).

Isu serupa dibahas dalam tulisan ini yaitu mengenai adanya komersialisasi pendidikan, bahwa komersialisasi pendidikan telah mengantarkan pendidikan sebagai instrument untuk melahirkan buruh-buruh bagi sektor industri, bukan sebagai proses pencerdasan dan pendewasaan masyarakat (Hartini, 2011).

Adanya komersialisasi pendidikan menggambarkan keadaan pendidikan lebih diorientasikan kepada praktik pendidikan layaknya lembaga penghasil mesin yang siap mem-*supply* pasar industri dan diukur secara ekonomis. Pendidikan menjadi hal yang eksklusif dan jauh dari masyarakat umum bahkan hanya bisa dirasakan oleh kalangan tertentu (elit penguasa) (Polglaze, 2016).

Istilah "komersialisasi" berasal dari "komersial" yang berkaitan dengan bisnis dan perdagangan, yang melibatkan barang atau layanan yang dijual atau memiliki nilai niaga tinggi, terkadang

dengan pengorbanan nilai-nilai lain seperti nilai sosial dan budaya. Komersialisasi merujuk pada tindakan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan.

Istilah komersialisasi sering dikenal dalam bidang ekonomi dan relevan dalam konteks sumber daya alam, yang dapat diperdagangkan. Namun, komersialisasi tidak sejalan apabila diterapkan dalam konteks pendidikan karena pendidikan berkaitan dengan pengembangan potensi manusia yang pada dasarnya berperan dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, komersialisasi pendidikan dianggap sebagai tindakan yang tidak terpuji, karena dapat mengorbankan nilai-nilai etika, budaya, dan agama. Akibat adanya komersialisasi pendidikan bisa berujung pada pertukaran antara yang baik dan yang buruk, serta antara yang benar dan yang salah (Purwaningrum, 2023).

Berikut beberapa aspek yang memunculkan komersialisasi pendidikan (Purwaningrum, 2023).

1. Aspek Politik

Pendidikan sebagai kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh seluruh individu, memiliki dimensi politik berkaitan dengan pengelolaannya sesuai dengan ideologi yang dianut oleh negara. Tuntutan penyelenggaraan sistem pendidikan di Indonesia berdasarkan pada demokrasi Pancasila, yang menekankan prinsip bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kebebasan yang sama. Dalam proses mendapatkan pendidikan, prinsip ini tercermin dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, yang menyatakan tujuan untuk meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat.

2. Aspek Budaya

Masyarakat Indonesia sangat menghormati gelar akademis, sebagai contoh, hampir setiap keluarga yang memiliki anggota keluarga yang telah menyelesaikan pendidikan tinggi, selalu menampilkan foto wisuda mereka di dinding rumah. Hal ini mencerminkan bahwa di Indonesia masih ada budaya yang sangat menghargai gelar akademis. Kultur ini menjadi lebih kuat di kalangan lembaga pemerintah yang kerap kali mempromosikan atau mengangkat pegawai yang memiliki gelar sarjana tanpa memeriksa atau menguji terlebih dahulu kemampuan akademik mereka. Ironisnya, program pendidikan semacam ini banyak diminati oleh pejabat-pejabat.

3. Aspek Ekonomi

Aspek ekonomi adalah bagian yang harus dibahas jika berbicara tentang biaya pendidikan. Biaya pendidikan nasional pada dasarnya harus menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Bab XIV, Pasal 50, Ayat 6, dinyatakan bahwa perguruan tinggi memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan biaya pendidikan mereka sendiri. Ini mengindikasikan bahwa pemerintah menghadapi kendala dalam membiayai pendidikan nasional, terutama pendidikan tinggi, yang sebelumnya mendapatkan subsidi sebanyak 75% dari pemerintah dan 25% sisanya dibiayai oleh masyarakat, termasuk dana SPP.

4. Aspek Sosial

Pendidikan memiliki dampak signifikan pada perubahan strata sosial individu, sejatinya semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, strata sosialnya cenderung meningkat. Tingkat pendidikan yang tinggi dan tingkat kebudayaan masyarakat yang tinggi akan menjadi indikator pertumbuhan bangsa dan negara terkait. Meskipun demikian, bagaimana seseorang dapat mencapai pendidikan tinggi apabila biaya pendidikan tinggi tersebut hanya dapat terjangkau oleh masyarakat dengan tingkat ekonomi yang baik. Pertanyaannya bagaimana situasi bagi masyarakat yang berada dalam kelompok ekonomi yang kurang mampu.

5. Aspek Teknologi

Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, lembaga pendidikan dituntut untuk menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung proses belajar-mengajar. Namun, terkadang lembaga pendidikan menggunakan perkembangan teknologi sebagai alasan untuk menjalankan komersialisasi pendidikan. Dampaknya adalah biaya masuk atau SPP di sekolah dan perguruan tinggi menjadi semakin tinggi, sehingga peserta didik dari lapisan ekonomi menengah ke bawah tidak mampu membayar biaya tersebut. Akibatnya, mereka tertinggal dalam mengakses teknologi, padahal teknologi memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan, dan perkembangan negara.

Faktanya jika melihat situasi dan kondisi yang terjadi terlihat bahwa komersialisasi pendidikan dianggap sebagai misi dari lembaga pendidikan modern untuk mengabdikan kepada kepentingan

pemilik modal dan bukan sebagai sarana pembebasan bagi kaum tertindas. Akibatnya pendidikan yang humanisasi tidak tercapai dalam proses pendidikan karena adanya komersialisasi pendidikan. Menurut Satriyo Brojonegoro hanya mampu dinikmati oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki modal untuk mengakses pendidikan. Namun, lembaga tersebut tidak dapat disebut dengan istilah komersialisasi pendidikan karena lembaga pendidikan memang tidak memperdagangkan pendidikan, tetapi uang pembayaran sekolah yang sangat mahal (Asmirawanti, 2015).

Pendidikan mahal saat ini sudah menjadi trend tersendiri di dunia pendidikan, pendidikan diibaratkan sebagai pasar atau supermarket yang menyediakan berbagai barang yang diperlukan oleh pelanggan, sedangkan pendidik (guru atau dosen) sebagai kasir yang selalu melayani pelanggan yaitu peserta didik mereka sendiri. Biaya pendidikan yang mahal sebenarnya mempunyai pengaruh besar terhadap kualitas lembaga pendidikan di Indonesia, apalagi di era globalisasi saat ini segala sesuatu banyak dinilai dengan materi. Akibatnya sekolah negeri favorit kini hampir tidak berbeda jauh dengan sekolah swasta dalam masalah biaya pendidikan. Lembaga pendidikan saling bersaing dalam masalah mutu dan fasilitas untuk menarik peminat yang banyak sehingga biaya pendidikannya pun semakin mahal (Asmirawanti, 2015).

Tiga dampak kapitalisme terhadap pendidikan yaitu:

1. Hubungan antara kapitalisme dan pendidikan urban menyebabkan praktek-praktek sekolah/kampus yang lebih mendukung kontrol ekonomi oleh kelas-kelas elit.
2. Hubungan antara kapitalisme dan ilmu pengetahuan telah mendorong berkembangnya ilmu pengetahuan hanya berfokus mendapatkan profit material dibanding untuk menciptakan kehidupan global yang lebih baik.
3. Perkawinan antara kapitalisme dan pendidikan serta kapitalisme dan ilmu pengetahuan telah menciptakan pondasi bagi ilmu pendidikan yang menekankan nilai-nilai korporasi dengan mengorbankan nilai-nilai keadilan sosial dan martabat kemanusiaan (Asmirawanti, 2015).

Merujuk kembali pada gerakan mahasiswa Chile, ada sebuah gerakan menantang pasar pendidikan hal ini sebagai hak dan perjuangan melawan keuntungan setelah mencapai pendidikan tinggi pada tahun 2007-2009.

Mereka yang disebut Para "penguin" lama kembali turun ke jalan pada tahun 2011. Kontur targetnya lebih jelas dibandingkan tahun 2006. Gerakan ini tidak lagi menghadapi seorang wanita kiri yang lembut (Michelle Bachelet), tetapi seorang presiden dari sayap kanan tengah (Sebastian Pinera). Seorang pengusaha *miliarder*, Pinera tidak memenuhi janji-janji kampanyenya untuk menjual perusahaan-perusahaan sebelum menjabat (Somma, 2012).

Hal ini dapat digambarkan sebagai inti dari *neoliberalisme* yang belum dilepaskan, memberikan target yang lebih jelas untuk tuntutan gerakan. Joaquín Lavín, Menteri Pendidikan hingga Juli 2011 (ketika dia diganti justru karena protes mahasiswa), turut membantu dia adalah salah satu pendiri dan pemegang saham sebuah Universitas Swasta yang dicurigai telah melanggar Undang-Undang Nirlaba. Seperti pada tahun 2006, tuntutan awal pada tahun 2011 relatif sempit, tuntutan tersebut berkisar pada subsidi transportasi siswa dan penundaan pemberian beasiswa. (Somma, 2012).

Setelah beberapa bulan berlalu, tuntutan tersebut semakin meluas, mulai dari penyediaan pendidikan gratis bagi semua warga Chili dan hukuman yang efektif bagi para pelaku yang mengambil keuntungan dari pendidikan, hingga proposal untuk mendanai pendidikan publik seperti reformasi pajak dan perpanjangan kepemilikan negara atas sumber daya tambaga yang sangat besar di negara tersebut. Gerakan ini kemudian berkembang secara numerik, dari beberapa ribu orang pada pawai-pawai pertama menjadi ratusan ribu orang pada musim dingin tahun 2011 (Somma, 2012).

Gerakan tersebut menantang pasar dengan mengguncang dua asumsi dasarnya. Pertama adalah kepantasan bahwa aktor-aktor swasta mendapatkan keuntungan dari kegiatan pendidikan. Meskipun hal ini ilegal di Chili, banyak institusi pendidikan yang mendapatkan keuntungan dengan menggunakan praktik-praktik yang rumit misalnya dengan membuat agen *real estate* yang menyewakan gedung

kepada universitas dengan harga yang sangat tinggi (Somma, 2012).

Gerakan ini sangat penting dalam menyebarkan keyakinan bahwa salah satu alasan mengapa pendidikan di Chili sangat mahal (dan keluarga harus berjuang keras untuk membiayainya) adalah karena adanya beberapa "pengusaha" pendidikan yang menjadi kaya raya. Hubungan kognitif ini sangat penting untuk menciptakan rasa ketidakadilan yang memberi energi pada gerakan tersebut. Dilain sisi, hal ini merupakan pukulan telak bagi filosofi masyarakat pasar Chili, menyatakan bahwa para pelaku pasar yang termotivasi oleh keuntungan akan berbuat baik. Pendidikan sebagai hak bukan barang konsumsi Asumsi kedua yang ditantang oleh gerakan ini mungkin lebih mendasar dari cara kerja pasar pendidikan, yaitu kesesuaian harga yang harus dibayar oleh masyarakat untuk mendapatkan pendidikan (Somma, 2012).

Gerakan ini hadir karena sistem Chili menciptakan ketidaksetaraan yang sangat besar antara mereka yang cukup kaya untuk mengakses dan menyelesaikan studi di institusi pendidikan berkualitas tinggi dan mereka yang terlalu miskin untuk melakukannya. Untuk menghapus ketidakadilan ini, yang bertentangan dengan sistem meritokrasi yang seharusnya, gerakan ini menuntut penyediaan pendidikan publik yang gratis dan berkualitas tinggi untuk semua warga negara. Oleh karena itu, pendidikan menjadi sebuah hak dan bukan barang konsumsi. Para mahasiswa mengklaim bahwa hal ini tidak mustahil untuk dilakukan di Chili, seperti yang ditunjukkan oleh negara-negara berpenghasilan menengah lainnya yang memiliki sistem seperti itu (Somma, 2012).

Memecahkan ketegangan antara persatuan internal dan dukungan yang terus bertambah bagi sebagian besar gerakan, semakin banyak pendukung berarti semakin banyak keberagaman oleh karena itu semakin banyak peluang untuk perpecahan. Setiap gerakan yang membawa banyak orang turun ke jalan menghadapi tantangan untuk menjaga persatuan dan solidaritas internal sambil terus berkembang. Jika kita menggunakan jumlah pemrotes sebagai indikator ukuran gerakan, jelas bahwa gerakan ini menjadi masif dan progresif (Somma, 2012).

Lantas bagaimana cara mereka dapat berhasil mempertahankan persatuan internal gerakan di tengah-tengah fenomena isu yang dihadapi dan gerakan seperti apa yang dilakukan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Apakah kita dapat membingkai pola serupa dalam pergerakan mahasiswa Indonesia.

Membahas teka-teki tersebut. Potensi perpecahan internal dapat diminimalisir dengan menciptakan lingkungan yang sangat partisipatif di dalam tubuh mahasiswa dan gaya kepemimpinan yang horizontal. Hal ini memberikan legitimasi terhadap aksi-aksi gerakan dan mencegah tren oligarki yang digambarkan satu abad yang lalu oleh sosiolog politik Robert Michels (1959). Pertumbuhan jumlah pengunjuk rasa diakibatkan oleh resonansi tuntutan mahasiswa pada masyarakat luas (Somma, 2012). Termasuk, pada kelompok-kelompok tertentu yang dimobilisasi seperti buruh dan aktivis lingkungan yang juga memiliki ketidakpuasan yang sama dengan gerakan mahasiswa terhadap neoliberalisme. Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud untuk menulis judul "Membingkai Pola *Chilean Student Movement* Pada Pergerakan Mahasiswa Indonesia dalam Perjuangan Hak Pendidikan".

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan adalah Historis Komparatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif analitis. Ruang lingkup penelitian ini adalah membahas tentang pola pergerakan mahasiswa Indonesia saat ini. Studi perbandingan mengacu kepada pergerakan mahasiswa Chile. Untuk mencapai tujuan penelitian. Peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Proses analisisnya menggunakan Studi Kepustakaan. Studi Kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang diambil dari buku, artikel jurnal, berita-berita di media massa, dan/atau observasi partisipatoris guna meninjau kejadian empirik dilapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pola Pergerakan Mahasiswa Chile dan Pergerakan Mahasiswa Indonesia

Pola gerakan mahasiswa Chile tersebut muncul atas hasil sampingan dari Neoliberalisme Chili

yang membutuhkan sebuah tinjauan terhadap proses di mana sistem pendidikan Chili dipandu oleh prinsip-prinsip pasar. Awalnya Pinochet membuat beberapa perubahan pada pendidikan Chili, hingga tahun 1970-an bergantung pada pendanaan negara dan administrasi terpusat oleh Kementerian Pendidikan. Pinochet mendesentralisasikan pendidikan dasar dan menengah, memberikan kewenangan kepada pemerintah kota untuk mengelola sekolah-sekolah, memberikan subsidi pada sekolah-sekolah swasta, yang mana jumlahnya meningkat secara dramatis, dan meliberalisasi pendidikan tinggi, dengan mendorong universitas swasta dan institut teknik (Cabalin, 2014).

Kombinasi dari perubahan-perubahan ini menghasilkan peningkatan empat kali lipat jumlah penduduk Chili yang mengakses pendidikan tinggi antara tahun 1990 dan 2010, yang merujuk pada peningkatan cakupan dari 16% menjadi 40% pada kelompok usia 18-24 tahun. Sekitar 70% persen dari siswa-siswa ini adalah orang pertama dalam keluarga mereka yang mencapai tingkat tersebut, yang mana dipandang sebagai sarana paling pasti untuk mobilitas sosial ke atas (Cabalin, 2014).

Perluasan cakupan ini disambut baik oleh para politisi serta warga negara, sehingga kegagalan pasar pendidikan yang baru ini tetap tersembunyi dari perdebatan politik. Pada akhirnya kegagalan-kegagalan itu menjadi terlihat. Pertama, karena pengawasan negara diabaikan, pelatihan yang diberikan oleh banyak institusi pendidikan menengah dan tinggi yang baru sangat kurang. Ketika para pemberi kerja menyadari hal ini, mereka semakin mempekerjakan lulusan dari lembaga-lembaga ini (yang jarang berasal dari kelas atas), akhirnya menggagalkan harapan mereka akan mobilitas ke atas. Terlebih lagi adanya sistem sekolah swasta yang mahal dan hanya terjangkau oleh kalangan atas. Hal ini menciptakan kesenjangan yang amat besar dalam kualitas pendidikan dan keuntungan ekonomi (Cabalin, 2014).

Kedua, biaya pendidikan relatif sangat tinggi, membuat pendidikan Chili menjadi salah satu yang termahal di dunia. Pinjaman yang didukung oleh negara meluas dan diambil oleh sekitar 70% dari populasi siswa. Namun, keluarga tetap membiayai sekitar tiga perempat biaya pendidikan salah satu proporsi tertinggi di antara Negara-negara OECD, yang mana Chili menjadi anggotanya sejak tahun 2010. Karena pinjaman tersebut memiliki suku

bunga yang tinggi, mengakibatkan terjadinya penumpukan utang yang sangat besar dan sulit untuk dilunasi. Masalah ini jelas lebih sulit bagi sebagian besar mahasiswa yang tidak mampu membayar semua biaya pendidikan dan harus putus kuliah (Cabalin, 2014).

Berdasarkan hal tersebut mereka tidak mendapatkan ijazah pendidikan, melainkan frustrasi dan utang yang sering kali membahayakan keuangan keluarga. Akhirnya, meskipun mengambil keuntungan dari kegiatan pendidikan adalah ilegal di Chili, para pemilik banyak institusi swasta melanggar semangat hukum melalui prosedur yang rumit. Akibatnya, sejumlah besar uang mengalir dari kantong keluarga populer dan kelas menengah ke kantong para pengusaha pendidikan yang semakin kaya. Artinya biaya yang harus dikeluarkan untuk memperluas pendidikan tinggi melalui mekanisme pasar adalah kesenjangan dalam kualitas pendidikan, banyak utang dan frustrasi, serta kerentanan ekonomi bagi banyaknya keluarga kelas menengah dan menengah ke bawah (Cabalin, 2014).

Partisipasi melahirkan legitimasi kesempatan yang melimpah untuk berpartisipasi. Gaya kepemimpinan horizontal meminimalisir kecenderungan perpecahan dalam gerakan mahasiswa Chili. Partisipasi, pada gilirannya, bergantung pada organisasi internal. Gerakan ini dikoordinasikan oleh CONFECH (Konfederasi Mahasiswa Chili), yang terdiri dari perwakilan asosiasi mahasiswa dari sekitar tiga puluh Universitas Negeri dan Swasta. Perwakilan dipilih dalam pemilihan berkala oleh populasi mahasiswa yang bersangkutan, sehingga memungkinkan adanya rotasi yang lancar dalam posisi kepemimpinan. Salah satu ilustrasi dari fluiditas tersebut adalah pemilihan FECH pada tahun 2011, sebagai salah satu organisasi mahasiswa Universitas Chili yang paling berpengaruh (Cabalin, 2014).

Gerakan ini berkembang pesat selama tahun 2011, ketika FECH dipimpin oleh Camila Vallejo, namun hal ini tidak menjamin terpilihnya kembali dia dikalahkan dalam pemilihan umum akhir tahun 2011 oleh presiden FECH saat ini, Gabriel Boric. Salah satu aspek yang paling menonjol dari gerakan ini adalah cara mereka mengambil keputusan. Karena gerakan ini menentang sifat non-partisipatif dan sangat elitis dalam politik Chili kontemporer, tokoh-tokohnya yang paling terlihat

menganggap diri mereka sebagai juru bicara dalam otoritas gerakan (Cabalin, 2014).

Bahwasanya keputusan-keputusan besar harus didukung oleh elemen mahasiswa di tingkat bawah. Biasanya, setelah bertemu dengan pihak pemerintahan untuk mendengarkan proposal reformasi, perwakilan gerakan memanggil para mahasiswa ke majelis regional dan nasional. Proposal-proposal dipresentasikan dan didiskusikan untuk mendapatkan sebuah keputusan (yang sejauh ini hampir selalu berujung pada penolakan). Ini adalah proses yang lambat karena waktu yang dibutuhkan untuk memanggil dan merayakan majelis, tetapi ini memberikan legitimasi pada keputusan gerakan karena semua siswa yang tertarik memiliki kesempatan untuk menyuarakan keprihatinan mereka (Cabalin, 2014).

Sebagaimana pada gerakan mahasiswa di Indonesia dimulai ketika protes mahasiswa yang terjadi pada tahun 1998, yang memainkan peran penting dalam menjatuhkan rezim otoriter Presiden Soeharto. Gerakan mahasiswa 1998 dimulai sebagai tanggapan terhadap krisis keuangan Asia dan penanganan ekonomi oleh pemerintah, serta kebijakan represif dan pelanggaran hak asasi manusia oleh rezim. Protes dimulai di Jakarta, dengan mahasiswa menuntut demokrasi yang lebih besar dan pemberantasan korupsi dan nepotisme. Seketika demonstrasi segera menyebar ke kota-kota lain di Indonesia dan tidak hanya melibatkan mahasiswa, tetapi juga kelompok masyarakat sipil dan lapisan masyarakat lainnya.

Gerakan ini memuncak dalam serangkaian protes pada Mei 1998, yang melihat puluhan ribu orang turun ke jalan di seluruh Indonesia, yang mengarah pada pengunduran diri Presiden Soeharto. Peristiwa ini menandai titik balik yang signifikan dalam sejarah politik Indonesia, mengantarkan periode reformasi demokrasi dan iklim politik yang lebih terbuka. Sejak itu, gerakan mahasiswa terus memainkan peran aktif dalam politik Indonesia, mengadvokasi berbagai isu seperti hak asasi manusia, hak buruh, dan perlindungan lingkungan. Sejalan dengan meningkatnya kuantitas dan kualitas gerakan mahasiswa, berbanding lurus dengan upaya pemerintah menindak protes mahasiswa, yang menyebabkan bentrokan dengan polisi dan penangkapan aktivis, dalam skala mikro, dan

pelemahan serta pelumpuhan besar-besaran gerakan mahasiswa secara skala makro.

Kini pergerakan di Indonesia ternilai bahwa ruh gerakan mahasiswa Indonesia yang linglung terhadap arah gerakannya sendiri. Penggerak di dalamnya hanya reaktif setiap kali melakukan pergerakan. Arah juangnya bergantung pada keributan yang ditimbulkan elit. Tuntutan mereka bersifat reaktif dan hanya bergantung pada masalah yang sedang diributkan elit politik. Namun, logika moralis itu pada akhirnya mendegradasi gerakan mahasiswa. Hari ini, selain tidak punya arah gerak yang jelas, gerakan mahasiswa pun gagal mendapat simpati dari setiap diri mahasiswa itu sendiri.

Terbukti, dari beberapa aksi-aksi yang dilakukan, gerakan mahasiswa tidak bisa memobilisasi massa dalam jumlah besar, seperti yang terlihat pada aksi demonstrasi terkait penolakan putusan MK dan dinasti politik. Pada aksi tersebut, eskalasi massa yang terlibat jauh lebih sedikit dibanding aksi menolak Omnibus Law maupun 'reformasi dikorupsi.' logika moralis tidak bisa terus-terusan dipertahankan oleh gerakan mahasiswa. Logika itu cenderung menciptakan jarak antara mahasiswa dengan masalah mereka sendiri. Seolah-olah, mahasiswa merupakan kelompok yang sepenuhnya bijak dan tidak memiliki masalah. Mengakibatkan mahasiswa tercerabut dari basis organik pergerakannya. Mereka makin sibuk mengurus demokrasi dan segala tetek bengeknya, tetapi malah kelimpungan dengan masalah sektoralnya sendiri (Aurelio, 2021).

Pada umumnya para negarawan dan politisi negeri ini tidak lahir tanpa penempatan dan pendidikan yang dilaluinya selama masih menjadi mahasiswa, baik itu melalui organisasi intra kampus seperti DEMA, SEMA maupun organisasi ekstra seperti HMI, PMII, GMNI, PMKRI dan seterusnya. Mereka adalah para aktivis dan kader-kader pilihan. Hal sedemikian juga berlaku bagi sistem dan pola rekrutmen kepartaian di negeri ini. Para politisi Senayan dan para pejabat negara selama ini pada umumnya adalah dari para aktivis saat masih berstatus mahasiswa. Hal ini menjadi potensi besar untuk memperoleh akses di dunia politik dan pemerintahan (Aurelio, 2021).

Masalahnya sekarang, bagaimana pendidikan dan penempatan di kampus itu mampu mengantarkan mereka ke kancah politik dan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, Sebab bagaimana pun, praktik-praktik yang dialami di kampus saat mereka menjadi aktivis (BEM, MPM dan beberapa istilah jabatan fungsionaris lainnya di organisasi itu) akan terus terbawa sampai mereka menjadi tokoh dalam masyarakat. Pembelajaran politik di kampus menjadi faktor yang menentukan perilaku politik mereka ke depan. Kampus atau perguruan tinggi dengan demikian menjadi miniatur negara Indonesia (Aurelio, 2021).

Mengamati pergerakan mahasiswa akhir-akhir ini. Semisal demonstrasi hari-hari ini lebih ke tarung gagah-gagahan. siapa yang berorasi, aksi cenderung dijadikan panggung untuk menunjukkan eksistensinya. Maka tak heran, pelaksanaan aksi sering menumbalkan korban. Karena, petugas aksi yang ditugaskan sibuk menunjukkan eksistensinya tanpa terlalu memikirkan massa aksi yang lain. Bahkan saat ini trendnya adalah buat story di sosial media menggunakan foto atau video orasi ditambah dengan kata-kata idealik yang entah hasil sendiri atau buku (Zahir, 2023).

Implikasi terhadap peranan mahasiswa dibawah bayang-bayang negara juga melahirkan kebiasaan baru. Yang mulanya mahasiswa diidentikkan dengan penggerak atau demonstran, orang-orang yang berpengaruh terhadap berubahnya kebijakan sosial politik negara, dan kini sudah beralih trend. Beberapa mahasiswa sekarang lebih memilih sebagian besar hidupnya di kampus sebagai seorang penambang piala plastik. Tak bisa dipungkiri juga, hal ini merupakan batasan-batasan gerak mahasiswa saat ini yang diatur oleh negara. (Zahir, 2023)

Bahaya kini semakin besar karena pemimpin revolusioner yang ulung dan berpengaruh atas massa sebentar-sebentar dibuang dari Indonesia, sedangkan reaksi tambah lama tambah sengit. Artinya kita berhadapan dengan satu krisis revolusioner yang tak mudah dipahami oleh orang luar. Kebutuhan bukan kepada keberanian semata-mata melainkan terlebih lagi, “Pengetahuan revolusioner dan kecakapan mengambil sikap revolusioner”. Jika aksi massa yang teratur, pastilah kita dapat menuju kepada kemenangan (Malaka, 2020).

Jika tidak ada perombakan atau perubahan dalam gerakan mahasiswa, maka sejarah kejayaan gerakan mahasiswa akan tetap menjadi sejarah. Dan perubahan itu harus ditopang dari paradigma berpikir setiap entitas bahkan individu mahasiswa. Jika tidak, maka fakta-fakta kemenangan itu hanya akan menjadi cerita, dan cerita berubah menjadi legenda (Zahir, 2023).

Implikasi Pengaruh Kebijakan Pemerintah Mendorong Gerakan Mahasiswa Memperjuangkan Hak Pendidikan

Pendidikan tinggi di Chili sebuah kasus kebijakan pendidikan yang berorientasi pada pasar (Bellei 2009). Meskipun tidak ada satu model reformasi pasar dalam pendidikan, ada tiga komponen utama yang dapat diidentifikasi: kompetisi antar institusi, pilihan sekolah, dan privatisasi. Dalam pendidikan tinggi, kompetisi untuk mendapatkan sumber daya menyiratkan penarikan dana negara. secara relatif untuk institusi dan menggantinya dengan dana publik yang kompetitif, penjualan jasa, kerja sama dengan sektor swasta, dan pengenalan beasiswa (Cabalin, 2014).

Pilihan sekolah dipromosikan melalui berbagai subsidi yang bervariasi sesuai dengan permintaan, dalam bentuk pembiayaan publik untuk siswa atau kredit. Akhirnya, privatisasi melibatkan akses yang lebih besar bagi lembaga pendidikan swasta terhadap sumber daya publik, membuat mereka bersaing secara terbuka dengan lembaga-lembaga negara, dan, secara bersamaan, memperkenalkan dinamika seperti bisnis ke lembaga pendidikan publik, membuat mereka berperilaku lebih seperti entitas swasta. Dengan demikian, reformasi pasar dalam pendidikan cenderung mengaburkan semua perbedaan yang relevan antara universitas negeri dan swasta dalam hal hubungan mereka dengan negara, keluarga, dan ekonomi (Cabalin, 2014).

Penerapan gagasan-gagasan ini berbeda-beda di setiap negara; oleh karena itu, sangat penting untuk menggambarkan bagaimana gagasan-gagasan tersebut diterapkan pada pendidikan tinggi di Chili. Pada tahun 1981, kediktatoran Pinochet memulai pelaksanaan reformasi besar-besaran pada sistem pendidikan sebagai bagian dari transformasi neoliberal yang lebih besar pada negara, ekonomi dan kebijakan sosial. Kuncinya adalah menerapkan prinsip

subsidiaritas pada semua kegiatan negara, mendorong pasar yang tidak diatur (Cabalin, 2014).

Intinya pendidikan tidak lagi menjadi tanggung jawab negara, melainkan sebuah layanan yang tersedia dalam pasar yang semakin privat, yang dibayar oleh para penerima manfaat langsung sebut saja para mahasiswa. Reformasi pendidikan tinggi ini berjalan dengan dua cara: restrukturisasi universitas-universitas 'tradisional' yang sudah ada dan mendorong berdirinya lembaga-lembaga pendidikan tinggi swasta yang baru.

Hingga tahun 1980, pendidikan tinggi Chili terdiri dari dua universitas negeri (yang pada tahun 1973 menyumbang 67% dari jumlah mahasiswa di negara tersebut) dan 6 universitas swasta, semuanya didirikan berdasarkan piagam dan sebagian besar dibiayai oleh negara. Reformasi tahun 1981 telah mendesentralisasi universitas-universitas tradisional; kampus-kampus regional dan beberapa sekolah besar diubah menjadi universitas otonom yang independen. Selain itu, pemerintah membedakan antara universitas dan lembaga pendidikan teknis, dengan yang terakhir difokuskan pada program-program teknis pasca-sekolah menengah dan jabatan-jabatan tertentu yang berstatus renda (Cabalin, 2014).

Pemerintah juga mengubah pembiayaan universitas pendanaan langsung dari pemerintah secara bertahap berkurang; institusi harus bersaing untuk mendapatkan subsidi berdasarkan permintaan (misalnya, menarik siswa sekolah menengah yang berprestasi); dan kampus dipaksa untuk semakin mandiri dan akibatnya mulai memungut keuangan dari mahasiswa. Selain itu, sistem kredit bersubsidi juga diterapkan. Lembaga-lembaga swasta baru dapat mengakses dana tidak langsung dari pemerintah seperti dana kompetitif untuk penelitian dan subsidi berdasarkan permintaan namun mereka tidak menerima dana langsung dari pemerintah, dan para mahasiswanya tidak dapat mengakses pinjaman bersubsidi (Cabalin, 2014).

Kebijakan utama dalam hal ini adalah meningkatnya relevansi subsidi dengan permintaan, yang meningkat dari 44% dari total pengeluaran pemerintah untuk pendidikan tinggi pada tahun 1990 menjadi 74% pada tahun 2011.

Lembaga-lembaga 'tradisional' telah mengalami penurunan yang signifikan dalam hal pendanaan dari pemerintah, yang pada tahun 2011 secara rata-rata sekitar 17% dari total anggaran lembaga (CRUCH 2012, Council of Rectors of Chilean Universities), sehingga memaksa mereka untuk meningkatkan pendanaan mereka sendiri, menaikkan biaya untuk mahasiswa, dan menjual jasa.

Kendala pendanaan dalam kasus universitas negeri pembatasan hukum telah menghalangi mereka untuk berkembang secara signifikan; selain itu, pihak berwenang Chili belum pernah membentuk lembaga publik baru sejak reformasi 1981. Dengan kata lain, tidak ada dukungan politik untuk pengembangan atau perluasan universitas tradisional. Meskipun demikian, universitas tradisional masih menghasilkan sebagian besar penelitian ilmiah dan terus menjadi institusi akademik paling bergengsi dan selektif di Chili. Sebaliknya, institusi pendidikan tinggi swasta baru terus didirikan dan meningkatkan jumlah mahasiswa mereka secara eksponensial, pada tahun 2012 mencapai 72% dari jumlah mahasiswa pascasarjana nasional.

Percepatan ekspansi ini dapat dijelaskan oleh dua faktor utama. Pertama, lembaga-lembaga baru ini hampir seluruhnya merupakan lembaga pendidikan, yang sebagian besar menyediakan program berbiaya rendah, dan beberapa di antaranya (yang memiliki pertumbuhan paling tinggi) tidak selektif secara akademis. Kedua, pada tahun 2005, Kredit Swasta dengan Jaminan Negara (KSJN) diciptakan, sebuah fasilitas kredit dari bank kepada siswa/mahasiswa untuk membayar biaya pendidikan (dijamin oleh negara jika terjadi gagal bayar). Melalui subsidi ini, lembaga-lembaga ini memanfaatkan permintaan yang sangat besar yang tidak terpenuhi di sektor masyarakat kelas menengah dan bawah adanya permintaan laten, pertumbuhan subsidi negara dan standar yang lebih rendah untuk mendirikan institusi telah mengubah pendidikan tinggi menjadi pasar yang menarik bagi investor swasta nasional dan internasional.

Pemerintah yang demokratis juga membentuk lembaga-lembaga publik untuk memandu pasar pendidikan. (Orellana, 2015). Oleh karena itu, sebuah sistem penjaminan mutu diciptakan pada tahun 2006. Sistem ini terdiri dari akreditasi

kelembagaan yang bersifat sukarela (meskipun wajib untuk program pelatihan tertentu) yang dilakukan oleh lembaga-lembaga swasta dan berdasarkan standar dan norma-norma yang ditetapkan oleh Komisi Nasional Akreditasi, sebuah badan publik yang kemudian membuat keputusan akhir. Sistem ini berlaku sama untuk semua institusi pendidikan tinggi, akreditasi diperlukan untuk mendapatkan subsidi negara (termasuk pinjaman mahasiswa) dan digunakan oleh institusi untuk tujuan pemasaran (Orellana, 2015).

Berdasarkan kebijakan tersebut mahasiswa melakukan protes, mahasiswa melakukan *sit-in* atau pendudukan, dan bentuk pembangkangan sipil lainnya, serta upaya pengorganisasian masyarakat dan lobi untuk mempengaruhi pembuat kebijakan dan opini publik. Gerakan-gerakan ini sangat berdampak signifikan pada masyarakat, mengarah pada perubahan yang amat berarti dalam jangka panjang. Gerakan mahasiswa, memang tidak berada dalam ruang hampa, ia harus merespons masalah-masalah terdekat yang muncul dalam skala per-hari, yang berdampak kritis kepada rakyat. Meskipun dampak yang dihasilkan, dapat saja berlaku dalam jangka panjang.

Sepertinya adanya pembangkangan yang dilancarkan oleh kalangan mahasiswa terwujudnya tindakan kolektif. Hal ini muncul sebab adanya perasaan yang kalut atas kondisi sosial dan ekonomi yang ada, meningkatnya kesenjangan sebagai dampak adanya ketidakadilan sosial, kebijakan dan keputusan pemerintah yang berpihak dan tidak adil sehingga menyebabkan ketidakpuasan terhadap penyelenggara negara, serta sistem politik yang cenderung non-demokratis. Persepsi aksi atau gerakan mahasiswa lahir atas dorongan dan desakan untuk secara terus menerus berjuang demi nasib rakyat banyak, berbagai aliran dan kelompok mahasiswa yang terbentuk berdasarkan ideologi gerakannya turut serta melakukan aksi massa demonstrasi atau turun ke jalan untuk memperjuangkan tuntutan (Mardianti, 2022).

Bicara terkait pendidikan adalah sebuah usaha dalam menghantarkan manusia dalam menemukan pribadinya sendiri. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan dapat menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada setiap diri manusia. Pendidikan sesuai dengan

kodratnya adalah dapat memajukan kehidupan bangsa. Pendidikan di Indonesia pada awal abad ke-21 telah memasuki era baru. Jika sebelumnya sektor pendidikan dikerangkeng oleh rezim Soeharto, pada era reformasi kerangkeng itu dilepas. Sektor pendidikan saat ini memasuki era yang disebut sebagai “neoliberalisasi pendidikan” (Perdana, Y. Pratama A. R., 2022).

Di Indonesia pendidikan mahal menjadi salah satu isu yang tidak ada habisnya di dalam tubuh gerakan mahasiswa. Hal ini disebabkan oleh permasalahan pendidikan yang makin memburuk tiap tahunnya. Mulai dari nihilnya transparansi keuangan kampus sampai ketidakjelasan kebijakan biaya kuliah.

Permasalahan pendidikan mahal seolah tidak ada ujungnya salah satunya disebabkan oleh adanya neoliberalisme. Neoliberalisasi pendidikan munculkan masalah baru yang cukup pelik dan kompleks. Sebelumnya kegiatan penelitian, pengabdian, dan pengajaran (tri dharma perguruan tinggi) didikte dan *discreening* oleh rezim birokrasi Orde Baru. Di era liberalisasi pendidikan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dicengkeram oleh mekanisme pasar dan kepentingan modal (Novianto, 2017).

Hal itu terwujud melalui otonomi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang semakin luas dan bergantung kepada mekanisme pasar. Liberalisasi pendidikan telah menempatkan kampus tidak lagi sebagai sektor publik yang ditanggung pemerintah. Melalui mekanisme PTN-BH, kampus diberi otonomi pengelolaan keuangan sekaligus menjadi medan bisnis baru. Hasil dari PTN-BH adalah lahirnya beton-beton yang menjulang tinggi, seperti Pertamina Tower, Gedung Sinar Mas, atau Mushola Mandiri Syariah. Sementara proses menjadikan pendidikan formal sebagai komoditas telah berlangsung sejak era penjajahan di Hindia-Belanda. Setelah 71 tahun Indonesia merdeka.

Sehubungan dengan hal tersebut mahasiswa merupakan salah satu unsur penting dalam pembangunan masyarakat dan bangsa. Mereka memiliki peran dan fungsi yang penting dalam menghasilkan perubahan positif dan kemajuan di berbagai bidang. Pergerakan mahasiswa merupakan wujud nyata atas kelebihan dalam pemikiran ilmiah, di samping semangat mudanya, sifat kritisnya, dan ketahanan logisnya (Lukita, 2023).

Kendala yang mempengaruhi gerakan mahasiswa dalam menuntut pendidikan murah secara historis, ada tiga komponen yang menjadi permasalahan mendasar. Pertama, permasalahan struktural seperti kebijakan kampus yang tidak cukup mengakomodasi protes mengenai pendidikan mahal. Kedua, secara kultural, permasalahan muncul karena lemahnya pengorganisasian. Lemahnya pengorganisasian terjadi sebab dominasi kelas menengah ke atas di kampus yang tidak memperlakukan biaya. Sedangkan, gerakan mahasiswa juga belum mampu untuk mengajak pihak yang berkepentingan meliputi orang tua mahasiswa dan dosen-dosen progresif. Ketiga, pada taraf kebijakan, baik di undang-undang maupun ketentuan perguruan tinggi, tidak ada perkataan secara eksplisit bahwa biaya pendidikan harus murah. Ketentuan tersebut hanya ada di Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang masih harus ditafsirkan secara lebih jauh (Aurelio, 2021).

Kendala lainya terkait permasalahan relasi kuasa di lingkungan kampus semakin hari semakin menjamur, yaitu *patriarkis* dan *patronase*. Mahasiswa seringkali diibaratkan sebagai seorang anak yang harus diasuh, diawasi, dan dikontrol. Hal ini berbahaya karena tuntutan progresif dapat ditaklukan oleh relasi ini. Struktur relasi yang buruk ini juga kemudian dipercaya oleh mahasiswa. Hal tersebut berdampak pada gerakan mahasiswa. Jika dulu pengorganisasian mahasiswa jelas seperti struktur pemerintahan, sekarang peta tubuh gerakan di kampus menjadi majemuk (Aurelio, 2021).

Hal ini terjadi sebab kampus juga memobilisasi mahasiswa, misalnya mereka yang prestasinya tinggi. Ini membuat antar mahasiswa saling bertempur dan tuntutan-tuntutan struktural tidak memiliki pintu masuk. Mahasiswa harus mengonsolidasikan kekuatan-kekuatan yang ada baik dari kampus, mahasiswa, dosen progresif, dan kelompok yang berkuat dengan isu pendidikan murah. Dengan demikian, gerakan mahasiswa dapat menciptakan isu pendidikan mahal sebagai isu yang mendasar dan berjangka panjang (Aurelio, 2021).

Belakangan ini isu seperti kebebasan akademik, pembredelan pers, dan plagiasi oleh rektor menjadi isu nasional. Meskipun begitu, hal yang

menarik adalah isu pendidikan mahal tidak menjadi isu nasional. Salah satu aspek kuncinya adalah gerakan mahasiswa belum melihat isu ini sebagai permasalahan mendasar. Oleh karenanya, mahasiswa harus menjadikan isu pendidikan mahal sebagai perlawanan sehari-hari (Aurelio, 2021).

Masalah penting untuk diperhatikan oleh gerakan mahasiswa yaitu berhubungan dengan tuntutan dan narasi. Hal ini tidak perlu teknokratis dan tidak harus sangat instrumental. Seperti membuat bahasa menjadi bahasa yang sangat ilmiah, tuntutan harus dibuat sederhana dan butuh bahasa yang lebih populer untuk mengajak semua orang agar dapat memahami. Hal penting lainnya yang mestinya diperhatikan yaitu mahasiswa saat ini inginnya aksi lalu berubah seketika. Padahal, ini harus bertahap. Tuntutannya lebih kepada proses penyadaran dan harus mengajak setiap orang terlebih dahulu untuk mau terlibat pada isu. Apabila, ajakan tidak berisiko dan mahasiswa sudah berani, baru ditanamkan ideologinya dan sadarkan kondisinya (Aurelio, 2021).

Membaca peluang dan kesempatan adalah suatu hal yang perlu dipertimbangkan oleh gerakan mahasiswa. Faktanya, banyak pemangku kepentingan kampus. yang paling mendasar adalah orang tua mahasiswa. Misalnya melakukan upaya mobilisasi surat yang ditandatangani oleh para orang tua. Kalau orang tua diajak, maka simbolnya kuat seperti melawan kampus dengan simbol kekeluargaan. Kemudian mahasiswa harus mengajak masyarakat yang lebih luas seperti sektor buruh dan sektor petani, yang selama ini dianggap mahasiswa sebagai sektor-sektor progresif (Aurelio, 2021).

Dalam mengawal isu pendidikan mahal, kita dapat membuat hotline yang menerima keluhan dari orang tua mahasiswa. Kemudian, gerakan mahasiswa juga harus melakukan kampanye. Misalnya, kampanye yang menyadarkan bahwa para pemimpin negara saat ini dapat berhasil karena biaya pendidikan dulu murah. Penyadaran merupakan hal penting yang dilakukan mahasiswa saat ini, baik dengan menciptakan narasi, membangun kisah, atau membuat pemberitaan (Aurelio, 2021).

Dalam mengawal dan memperjuangkan hak pendidikan. Mahasiswa harus berani melakukan

protes. Hal ini penting karena saat ini mahasiswa seringkali takut untuk melakukan protes akibat banyaknya sanksi yang diberikan oleh PTN. Protes-protes tersebut harus dikonsolidasikan sehingga kekuatannya berlipat ganda. Lalu, gerakan mahasiswa harus memiliki riset yang memadai tentang biaya pendidikan. Ada banyak skripsi tentang biaya pendidikan tinggi. Penting untuk dianalisis secara bertahap agar dapat menjadi bahan yang memadai untuk mendorong kebijakan pendidikan yang murah. Kemudian, mahasiswa harus melihat dampak ideologis dengan adanya pendidikan mahal ini dan konsekuensinya. Melakukan penelitian dan komparasi yang ada, sehingga gerakan mahasiswa dapat mempunyai basis yang memadai untuk melakukan perlawanan. Hal penting lainnya yaitu gerakan mahasiswa juga harus melibatkan pihak-pihak terkait. Misalnya mahasiswa dapat mendorong lahirnya transparansi proyek-proyek PTN yang berkolaborasi dengan lembaga donor. Keterbukaan informasi ini nantinya dapat membuktikan bahwa kampus sebenarnya dapat menanggung biaya (Aurelio, 2021).

KESIMPULAN

Membingkai pola *Chilean Student Movement* pada pergerakan mahasiswa Indonesia dapat memberikan wawasan tentang strategi dan taktik yang efektif dalam perjuangan hak pendidikan. Dengan belajar dari pengalaman internasional, mahasiswa Indonesia dapat memperkuat gerakan mereka dan mengoptimalkan peluang untuk mencapai perubahan yang diinginkan. Solidaritas internasional dan pertukaran pengalaman juga dapat membantu memperkaya perspektif dan pendekatan dalam memperjuangkan hak-hak pendidikan di Indonesia.

Studi perbandingan antara *Chilean Student Movement* dan pergerakan mahasiswa di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat banyak persamaan dalam motivasi, metode aksi, dan tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa dalam memperjuangkan hak-hak pendidikan. Seperti meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan serta menentang komersialisasi pendidikan. Pola-pola aksi yang serupa, seperti demonstrasi massa, pemogokan, dan pendudukan kampus, menunjukkan bahwa strategi-strategi ini efektif dalam menarik

perhatian publik dan pemerintah, dalam memperjuangkan hak-hak pendidikan di Indonesia yang terpenting adalah penyadaran lebih luas secara inklusif disertai dengan perhatian isu yang terjadi agar dapat maksimal dalam melakukan riset kajian, pembuatan narasi hingga tuntutan. Misalnya pada gerakan mahasiswa Chile yang terkenal yaitu gerakan "Penguin". Mengacu atas hal tersebut pergerakan mahasiswa Indonesia harusnya lebih inovatif dan kreatif untuk menarik perhatian publik.

Peran organisasi mahasiswa sangat penting dalam mengkoordinasikan aksi dan menyuarakan tuntutan secara kolektif. Dukungan publik dan aliansi dengan kelompok-kelompok lain juga menjadi faktor penentu dalam memperkuat gerakan dan mencapai hasil yang diinginkan. Penggunaan media sosial telah menjadi alat yang sangat efektif dalam menyebarkan informasi, menggalang dukungan, dan mengorganisir aksi, yang semakin relevan dalam era digital saat ini.

Reaksi pemerintah terhadap pergerakan mahasiswa, baik di Chile maupun di Indonesia, sangat mempengaruhi dinamika dan hasil dari gerakan tersebut. Pengalaman di Chile menunjukkan bahwa tekanan yang konsisten bahkan memerlukan waktu yang cukup lama dalam melakukan pergerakan di Indonesia, penting menetapkan rencana jangka panjang, seiring dengan meraih dukungan luas dari berbagai lapisan masyarakat. Hal ini dapat mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi signifikan dalam sistem pendidikan.

SARAN

Organisasi mahasiswa di Indonesia perlu terus memperkuat struktur dan koordinasi mereka untuk meningkatkan efektivitas dalam mengkoordinasikan aksi dan menyuarakan tuntutan. Pembelajaran dari organisasi seperti CONFECH di Chile dapat menjadi inspirasi dalam membangun solidaritas dan strategi yang lebih kuat.

Mahasiswa harus aktif dalam membangun aliansi dengan berbagai kelompok masyarakat, termasuk serikat pekerja, guru, dan orang tua, untuk memperkuat dukungan terhadap gerakan mereka. Dukungan luas ini akan memberikan

tekanan lebih besar pada pemerintah untuk memenuhi tuntutan mahasiswa.

Mahasiswa di Indonesia perlu terus memanfaatkan media sosial secara strategis untuk menyebarkan informasi, menggalang dukungan, dan mengorganisir aksi. Penggunaan *hashtag*, kampanye online, dan kolaborasi dengan *influencer* dapat membantu memperluas jangkauan dan dampak dari gerakan.

Menyampaikan tuntutan yang spesifik dan realistis akan membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih terukur dan dapat dicapai. Belajar dari tuntutan spesifik mahasiswa Chile dapat membantu mahasiswa Indonesia dalam merumuskan tuntutan yang lebih jelas dan fokus.

Selain aksi langsung, penting bagi mahasiswa untuk membuka jalur dialog dan negosiasi dengan pemerintah. Pendekatan yang berimbang antara aksi protes dan dialog konstruktif dapat meningkatkan peluang untuk mencapai reformasi yang diinginkan. Melakukan studi lanjutan untuk terus mengevaluasi strategi dan hasil dari pergerakan mahasiswa akan membantu dalam mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta menyesuaikan pendekatan sesuai dengan dinamika yang berkembang.

Pengalaman dan pengetahuan terkait pola pergerakan mahasiswa di Chile dapat menjadi tolak ukur sebagai upaya untuk mendorong pergerakan mahasiswa di Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak pendidikan dan mencapai perubahan yang signifikan dalam sistem pendidikan nasional. Solidaritas dan belajar dari pengalaman internasional, seperti *Chilean Student Movement*, akan memberikan wawasan berharga.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmirawanti. (2015). "Komersialisasi Pendidikan," *Equilibrium Pendidikan Sosiologi* IV, no. 1 (2015): 1–10.
- Aurelio Z. R. (2021). *Strategi Gerakan Mahasiswa Dalam Menuntut Pendidikan Murah*. Retrieved from Balairungpress: <https://www.balairungpress.com/2021/04/s-trategi-gerakan-mahasiswa-dalam-menuntut-pendidikan-murah/>.
- Bartlett, J. (2022). "Siswa kembali turun ke jalan di Chili karena sekolah masih menjadi pusat protes". Retrieved from Theguardian.com: https://www-the-guardian-com.translate.goog/world/2022/nov/01/chile-school-students-protests?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc.
- Cabalin, C. (2014). "The Conservative Response to the 2011 Chilean Student Movement: Neoliberal Education and Media," 35(4) .
- Hartini, D. (2011). Skripsi Komersialisasi Pendidikan Di Era Globalisasi (Studi Kasus tentang Persepsi Masyarakat terhadap Kuasa Modal dalam Dunia Pendidikan di Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Surakarta tahun 2011).
- Jubaedah, S. (2019). Gerakan Mahasiswa (Kajian Tentang Peranan Mahasiswa Universitas Trisakti Pada Mei 1998 Dalam Proses Pergantian Kekuasaan Orde Baru). *Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 8(2).
- Kontras. (2010). "Gerakan Mahasiswa Mana tinjumu". Retrieved from Kontras.org: <https://kontras.org/2010/01/22/gerakan-mahasiswa-dimanakah-tinjumu/>.
- Lukita, F. (2023). *Peran Mahasiswa Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan*. Retrieved from Kegiatan.pkmuin-suka.ac.id: <https://kegiatan.pkmuin-suka.ac.id/single/peran-mahasiswa-dalam-meningkatkan-kualitas-pendidikan2023-11-2215-23-21>.
- Malaka, T. (2020). *Aksi Massa*. Yogyakarta: Narasi.
- Mardianti, E. (2022). Gerakan Mahasiswa Dalam Pusaran Tiga Orde Kekuasaan: Antara Gerakan Moralitas Atau Gerakan Politis. *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 2(2)
- Novianto, A. (2017). *Revolusi Penguin dan Gerakan Musim Dingin Belajar Dari Pengalaman Perlawanan Pelajar di Chile*. Retrieved from Majalahsedane.org: <https://majalahsedane.org/2017/05/15/revolusi-penguin-dan-gerakan-musim-dingin-belajar-dari-pengalaman-perlawanan-pelajar-di-chile/1176/kajian/>.
- Orellana. (2015). *Chilean Student Movement Against Neoliberal Educational Policies*. Retrieved from Researchgate.net: https://www.researchgate.net/publication/262578044_The_2011_Chilean_Student_Move

- ment_against_Neoliberal_Educational_Policies.
- Pamflet Generasi. (2018). “*Penguin Revolution and Chilean*”. Retrieved from Pamflet.or.id: <https://pamflet.or.id/2018/01/09/penguin-revolution-and-chilean-winter/>.
- Perdana, Y. Pratama A. R. (2022). *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia*. Jawa Tengah: Lakeisha.
- Polglaze, R. (2016) “*Chile: Student Set to Win Free Higher Education,*” Retrieved from www.greenleft.org.au: <https://www.greenleft.org.au/content/chile-students-set-win-free-higher-education>.
- Jurnal Equilibrium and Pendidikan Sosiologi, “Jurnal E Quilibrium Jurnal E Quilibrium” IV, no. 2 (2016): 174–83.
- Purwaningrum, A. Subhi, R. M. (2023). Faktor Penyebab Komersialisasi Pendidikan. Muaddib: *Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 2(1).
- Somma, N. (2012). “The Chilean Student Movement of 2011-2012: Challenging the Marketization of Education,” *Interface: A Journal for and about Social Movements* 4(2).
- Wahid, H. (2023). *Haruskah Indonesia Menerapkan Pendidikan Gratis*. Retrieved from [kompas.com: https://www.kompas.com/edu/read/2023/09/20/150529471/haruskah-indonesia-menerapkan-pendidikan-gratis?page=all](https://www.kompas.com/edu/read/2023/09/20/150529471/haruskah-indonesia-menerapkan-pendidikan-gratis?page=all).
- Zahir. (2023). *Gerakan Mahasiswa Momentum dan Terpecah Belah Bukti*. Retrieved from [Mediaunram.com: https://mediaunram.com/gerakan-mahasiswa-momentum-dan-terpecah-belah-bukti-hegemoni-pemerintah-orde-baru-masih-tumbuh-subur/](https://mediaunram.com/gerakan-mahasiswa-momentum-dan-terpecah-belah-bukti-hegemoni-pemerintah-orde-baru-masih-tumbuh-subur/).